



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BIRO DATA, KOMUNIKASI, DAN INFORMASI PUBLIK
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
INFRASTRUKTUR
DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
DENGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TENTANG
DUKUNGAN KEMITRAAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
PUBLIK, KOMUNIKASI DAN KEHUMASAN, SERTA PERSIDANGAN

NOMOR: 6/PKS/INFRA/X/2026

NOMOR: 5051/UN27.05/HK.07.00/2026

Pada hari ini, Jumat, tanggal dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh enam (02-10-2026), bertempat di Surakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Agnes Wirdayanti : Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 20 Tahun 2026 tanggal 26 Mei 2026 yang berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

PARAF PIHAK PERTAMA	
PARAF PIHAK KEDUA	

2. Didik Gunawan : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas
Suharto Sebelas Maret, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sebelas Maret berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 1222/UN27/HK/2024 tanggal 5 September 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas/Sekolah Universitas Sebelas Maret Periode 2024 – 2029, yang berkedudukan di Jalan Ir. Sutami 36 Kentingan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia 57126, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit kerja yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, hubungan masyarakat, dan persidangan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara pendidikan tinggi yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya pada Program Studi Ilmu Komunikasi, Ilmu Administrasi Negara, Program Studi Ilmu Administrasi Negara PSDKU Kebumen, serta Program Studi Hubungan Internasional, baik pada jenjang Sarjana (S1), Magister (S2) maupun Doktoral (S3).
3. bahwa **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerja sama dengan merujuk pada Nota Kesepahaman Bersama antara Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dan Universitas Sebelas Maret tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi Nomor 1/NKB/INFRA/VIII/2025 dan Nomor 73/UN27/KS/2025 tanggal 8 Agustus 2025.

PARAF PIHAK PERTAMA	
PARAF PIHAK KEDUA	

4. bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk melakukan kerja sama terkait dukungan kemitraan pengelolaan data dan informasi publik, komunikasi dan kehumasan, serta persidangan melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

Dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
4. Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 341);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 826);
dan
8. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kerja Sama dan Layanan Eksternal.

PARAF PIHAK PERTAMA	
PARAF PIHAK KEDUA	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Dukungan Kemitraan Pengelolaan Data dan Informasi Publik, Komunikasi dan Kehumasan, serta Persidangan melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, selanjutnya disebut "**PKS**", dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam PKS ini ditafsirkan sebagai berikut:

1. **Data dan Informasi Publik**, berarti data dan/atau informasi yang dihasilkan, dikelola, dan/atau didokumentasikan oleh **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, yang bersifat terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik, dan menjadi objek kerja sama dalam bentuk kajian, pendampingan, serta penguatan tata kelola pengolahan, visualisasi, dan literasi data.
2. **Komunikasi Publik dan Kehumasan**, berarti kegiatan penyampaian informasi, pengelolaan hubungan dengan media dan publik, serta pengelolaan citra kelembagaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**, yang menjadi objek kerja sama dalam bentuk kajian efektivitas komunikasi publik, analisis opini publik, serta pendampingan dan pelatihan penyusunan strategi dan pedoman komunikasi.
3. **Persidangan**, berarti dukungan kesekretariatan dan tata kelola atas penyelenggaraan rapat resmi di lingkungan **PIHAK KESATU**, meliputi rapat terbatas, rapat koordinasi antarkementerian/lembaga, dan rapat koordinasi lainnya.
4. **Informasi Rahasia**, berarti seluruh data dan informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan PKS ini.

PARAF PIHAK PERTAMA	
PARAF PIHAK KEDUA	

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud PKS ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan dukungan kegiatan pengelolaan data dan informasi publik, komunikasi dan kehumasan, serta persidangan melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan PKS ini adalah menjalin hubungan kelembagaan dan saling mendayagunakan kemampuan, sumber daya, keahlian, dan hasil penelitian yang dimiliki **PARA PIHAK** guna meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PIHAK KESATU** serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia dari **PARA PIHAK**.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, dalam kerangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama yang telah ditandatangani sebelumnya, **PARA PIHAK** melaksanakan kerja sama dalam bidang:

1. Persidangan, meliputi dukungan penyusunan bahan kebijakan, penulisan bahan, dan kajian evaluasi tata kelola dukungan persidangan;
2. Komunikasi Publik dan Kehumasan, meliputi pelatihan produksi konten komunikasi publik, pengelolaan media sosial dan hubungan media, pemantauan dan analisis isu strategis, manajemen komunikasi krisis, serta kajian efektivitas komunikasi publik dan analisis opini publik;
3. pengelolaan Data dan Informasi Publik, meliputi layanan informasi publik, pengolahan dan visualisasi data, serta penguatan literasi data;
4. pengembangan kompetensi sumber daya manusia, meliputi pelatihan, bimbingan teknis, kuliah umum, praktisi mengajar, penyediaan narasumber/tenaga ahli, dan publikasi bersama sesuai bidang ilmu atas hasil kajian/penelitian yang dilaksanakan berdasarkan PKS ini; dan

PARAF PIHAK PERTAMA	
PARAF PIHAK KEDUA	

5. bidang kerja sama lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

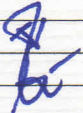
Pasal 4 **PELAKSANAAN**

- (1) Untuk merealisasikan PKS ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil dan/atau unit pelaksana teknis pada masing-masing **PIHAK** sebagai koordinator pelaksanaan.
- (2) Rincian, jadwal, keluaran, dan pembagian peran dalam setiap kegiatan sebagaimana disebutkan pada Pasal 2, dituangkan dalam rencana kerja yang disusun dan disepakati secara tertulis dan berkala oleh **PARA PIHAK** dengan memperhatikan sumber daya dan kewenangan yang dimiliki masing-masing **PIHAK** serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rencana kerja tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PKS ini.
- (3) Dalam hal terdapat rincian kegiatan yang belum tercantum dalam rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** dapat menyepakatinya melalui penyesuaian dan/atau penambahan rencana kerja yang dituangkan dalam berita acara atau dokumen kesepakatan tertulis lainnya, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap PKS ini.

Pasal 5 **HAK DAN KEWAJIBAN**

(1) **Hak PIHAK KESATU**

- a. memperoleh dukungan keahlian, narasumber, dan hasil kajian dari **PIHAK KEDUA** sesuai ruang lingkup dan rencana kerja yang disepakati **PARA PIHAK**;
- b. memperoleh dukungan penyusunan bahan kebijakan, penulisan bahan, dan kajian evaluasi tata kelola persidangan;

PARAF PIHAK PERTAMA	
PARAF PIHAK KEDUA	

- c. memperoleh dukungan pengembangan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan, bimbingan teknis, kuliah umum, praktisi mengajar, dan/atau kegiatan pengembangan kapasitas lainnya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**; dan
- d. memperoleh dukungan dalam pelaksanaan kegiatan Komunikasi Publik dan Kehumasan, pengelolaan Data dan Informasi Publik, serta kegiatan lain sesuai dengan Pasal 3 PKS ini.

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU**

- a. menyediakan data dan/atau informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja sama sesuai dengan kewenangan, kemampuan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan dukungan berupa pembimbingan, fasilitas, dan/atau akses yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KESATU**; dan
- c. memastikan personel **PIHAK KESATU** yang terlibat dalam pelaksanaan PKS ini mematuhi ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA** sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.

(3) Hak **PIHAK KEDUA**

- a. memperoleh akses terhadap data dan/atau informasi yang diperlukan untuk kepentingan pelaksanaan kerja sama, pendidikan, penelitian, dan pengembangan keilmuan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh kesempatan untuk memberikan dukungan keahlian, pengembangan kompetensi, dan/atau layanan akademik melalui dosen, akademisi, narasumber, dan/atau tenaga ahli sesuai dengan ruang lingkup kerja sama; dan
- c. memperoleh dukungan dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KESATU**.

PARAF PIHAK PERTAMA	
PARAF PIHAK KEDUA	

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. menyediakan dosen, akademisi, narasumber, dan/atau tenaga ahli yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dan ruang lingkup kerja sama;
- b. memberikan dukungan keahlian, kajian, pengembangan kompetensi, dan/atau kegiatan lainnya sesuai dengan rencana kerja yang disepakati **PARA PIHAK**;
- c. melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan/atau pengembangan keilmuan yang relevan dengan ruang lingkup kerja sama sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**; dan
- d. memastikan agar dosen, akademisi, narasumber, tenaga ahli, dan/atau pihak lain **PIHAK KEDUA** yang terlibat dalam pelaksanaan PKS ini mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KESATU**.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan PKS ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
KERAHASIAAN

- (1) **Informasi Rahasia** dinyatakan sebagai data dan informasi yang bersifat rahasia, kecuali data dan informasi yang menjadi milik publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, serta keamanan setiap Informasi Rahasia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** tidak akan mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak lain selain **PARA PIHAK** kecuali apabila **PIHAK** yang mengungkapkan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

PARAF PIHAK PERTAMA	
PARAF PIHAK KEDUA	

- (4) Berakhirnya atau pengakhiran PKS ini tidak menghilangkan kewajiban **PARA PIHAK** untuk tetap menjaga kerahasiaan setiap Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap kekayaan intelektual yang dibawa baik oleh **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** dalam rangka melaksanakan PKS ini akan tetap menjadi tanggung jawab dan kekayaan intelektual dari **PIHAK** tersebut.
- (2) **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini wajib memastikan bahwa hak kekayaan intelektual dimaksud tidak melanggar hak kekayaan intelektual milik pihak lain selain **PARA PIHAK** serta bertanggung jawab atas setiap klaim dari pihak lain tersebut sehubungan dengan penggunaan hak kekayaan intelektual dimaksud.
- (3) Kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan PKS ini menjadi milik bersama **PARA PIHAK** dan pengaturannya lebih lanjut ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Publikasi bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka (4) dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis **PARA PIHAK** dengan tetap mencantumkan kontribusi masing-masing **PIHAK**.
- (5) Ketentuan yang diatur dalam Pasal ini akan tetap berlaku meskipun PKS ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari timbul perbedaan penafsiran atau pendapat dalam pelaksanaan PKS ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

PARAF PIHAK PERTAMA	
PARAF PIHAK KEDUA	

Pasal 10
KORESPONDENSI

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan PKS ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan
Kewilayahan

u.p : Pranata Komputer Ahli Madya

Alamat : Jl. M.H Thamrin No.8, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota
Jakarta Pusat 10340

Telepon : (021) 23951100

Posel : anjang.prasetio@kemenkoinfra.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP)

Universitas Sebelas Maret

u.p : Wakil Dekan Bidang Nonakademik

Alamat : Jalan Ir. Sutami 36 A Kentingan Jebres Surakarta 57126

Telepon : 0271-635103

Posel : a.zuber@staff.uns.ac.id

(2) Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima oleh **PIHAK** lainnya pada:

a. tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir;

b. tanggal pengiriman melalui surel, dengan ketentuan surel tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh **PIHAK** yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan hari kerja, maka surel dianggap diterima pada hari kerja berikutnya.

(3) Apabila terdapat perubahan dalam detail korespondensi sebagaimana tercantum pada ayat (1), maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap substansi PKS ini.

PARAF PIHAK PERTAMA	
PARAF PIHAK KEDUA	

Pasal 11
FORCE MAJEURE (KEADAAN KAHAR)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam PKS ini adalah peristiwa atau kejadian luar biasa yang terjadi di luar kekuasaan, kemampuan, dan kendali **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan program, meliputi: bencana alam (gempa bumi, banjir bandang, letusan gunung berapi), wabah penyakit/pandemi skala masif, huru-hara/kerusuhan sosial, perang, revolusi, serta perubahan kebijakan regulasi pemerintah pusat yang secara langsung membatalkan atau melarang keberlangsungan objek kerja sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang mengalaminya wajib memberitahukan secara tertulis disertai bukti otentik dari instansi berwenang kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memberitahukan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan peristiwa tersebut tidak dianggap sebagai keadaan kahar, sehingga segala bentuk keterlambatan kinerja tetap menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang bersangkutan.
- (4) Apabila keadaan kahar terjadi melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka **PARA PIHAK** akan bertemu kembali untuk merundingkan perlu tidaknya dilakukan amendemen terhadap pelaksanaan PKS ini atau mengakhiri PKS ini secara musyawarah tanpa tuntutan ganti rugi apa pun dari satu **PIHAK** terhadap **PIHAK** lainnya.

Pasal 12
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan PKS ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PARAF PIHAK PERTAMA	
PARAF PIHAK KEDUA	

- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan perbaikan pelaksanaan, penyusunan program tindak lanjut, dan pertimbangan bagi pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

Pasal 13

AMENDEMEN ATAU ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam PKS ini, akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk amendemen atau adendum yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari PKS ini.

Pasal 14

JANGKA WAKTU

- (1) PKS ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu PKS ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku PKS ini.
- (3) Dalam hal PKS ini akan diakhiri oleh salah satu **PIHAK** sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang akan mengakhiri wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum PKS ini diakhiri.
- (4) Kecuali disepakati lain, pengakhiran PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berakhirnya PKS ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak akan memengaruhi pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan PKS.
- (5) PKS ini akan berakhir atau batal demi hukum, dalam hal terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang tidak memungkinkan berlangsungnya PKS ini.

PARAF PIHAK PERTAMA	
PARAF PIHAK KEDUA	

PKS ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tercantum di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



AGNES WIRDAYANTI

Kepala Biro Data, Komunikasi, dan
Informasi Publik

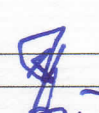
PIHAK KEDUA,


DIDIK GUNAWAN SUHARTO

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik


Mengetahui,
IRWAN TRINUGROHO

Wakil Rektor Bidang Perencanaan,
Kerja Sama, Internasionalisasi, dan
Informasi

PARAF PIHAK PERTAMA	
PARAF PIHAK KEDUA	

**LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA DUKUNGAN KEMITRAAN PENGELOLAAN DATA DAN
INFORMASI PUBLIK, KOMUNIKASI DAN KEHUMASAN, SERTA PERSIDANGAN**

PROGRAM/KEGIATAN KERJA SAMA PERGURUAN TINGGI

NO	ISU STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN KERJA SAMA	OUTCOME	TAHUN PELAKSANAAN				PENANGGUNG JAWAB
	BIDANG KERJA SAMA	KEBUTUHAN			2026	2027	2028	2029	
1	Penyusunan bahan kebijakan dan dukungan persidangan	Penguatan tata kelola penulisan dan penyusunan bahan kebijakan serta dukungan persidangan pimpinan di lingkungan Kemenko Infra.	1. Kajian dan evaluasi tata kelola penulisan serta penyusunan bahan kebijakan; 2. Penyusunan pedoman dan format baku naskah kebijakan, bahan pimpinan, notula, serta risalah rapat; 3. Bimbingan teknis penulisan naskah kebijakan (<i>policy brief</i>) serta penyusunan notula dan risalah bagi sumber daya manusia PIHAK KESATU.	1. Tersedianya dokumen evaluasi dan rekomendasi tata kelola penyusunan bahan kebijakan; 2. Tersedianya pedoman dan format baku naskah kebijakan, bahan pimpinan, serta notula; 3. Meningkatnya kompetensi penulisan kebijakan dan penyusunan bahan persidan gan. 4. gan.	√	√	√		1. Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik, Kemenko Infra; 2. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret.

PARAF PIHAK PERTAMA	
PARAF PIHAK KEDUA	

2	Komunikasi Publik dan Kehumasan	Penguatan komunikasi publik dan kapasitas Kemenko Infra.	1. Penyusunan strategi komunikasi publik dan protokol manajemen komunikasi krisis; 2. Pelatihan penulisan siaran pers, hubungan media, dan produksi konten digital bagi sumber daya manusia PIHAK KESATU ; 3. Pendampingan pengelolaan kanal media sosial dan hubungan media.	1. Tersedianya dokumen strategi komunikasi publik dan protokol komunikasi krisis; 2. Meningkatkan kompetensi kehumasan sumber daya manusia PIHAK KESATU ; 3. Meningkatkan kualitas jangkauan konten komunikasi publik.	✓	✓	✓	✓	1. Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik, Kemenko Infra; 2. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret.
3	Pemantauan dan analisis isu strategis	Penguatan pemantauan isu dan pengukuran efektivitas komunikasi publik berbasis penelitian.	1. Kajian efektivitas komunikasi publik atas program prioritas bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan; 2. Survei dan analisis opini publik serta pemantauan isu strategis secara berkala; 3. Penyusunan	1. Tersedianya laporan kajian efektivitas komunikasi publik; 2. Tersedianya hasil analisis opini publik dan isu strategis secara berkala; 3. Tersedianya instrumen pengukuran	✓	✓	✓	✓	1. Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik, Kemenko Infra; 2. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret.

PARAF PIHAK PERTAMA	
PARAF PIHAK KEDUA	

			instrumen dan indikator pengukuran efektivitas komunikasi publik.	efektivitas komunikasi publik.						1. Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik, Kemenko Infra; 2. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret.
4	Layanan informasi publik	Peningkatan layanan informasi publik serta literasi informasi masyarakat.	1. Pendampingan penguatan layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); 2. Diseminasi dan literasi informasi publik kepada masyarakat; 3. Kuliah umum dan praktisi mengajar di bidang keterbukaan informasi publik.	1. Meningkatkan kualitas dan kepatuhan layanan informasi publik; 2. Meningkatkan literasi informasi publik masyarakat; 3. Terselenggaranya alih pengetahuan antara PARA PIHAK .	✓	✓	✓	✓		1. Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik, Kemenko Infra; 2. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret.
5	Pengelolaan Data dan Informasi Publik	Penguatan penyajian data pembangunan kewilayahan sebagai bahan komunikasi publik dan pengambilan keputusan pimpinan.	1. Pelatihan pengolahan, visualisasi, serta penyampaian data secara naratif (<i>data storytelling</i>); 2. Pendampingan penyusunan bahan paparan dan infografik pembangunan	1. Meningkatkan kompetensi penyajian dan visualisasi data; 2. Tersedianya bahan paparan dan infografik yang informatif bagi pimpinan; 3. Tersedianya rekomendasi	✓	✓	✓			1. Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik, Kemenko Infra; 2. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas

			3. Kajian pemanfaatan data untuk penyusunan narasi kebijakan publik dan pelayanan publik.	pemanfaatan data dalam penyusunan narasi kebijakan.					Sebelas Maret.
6	Pengembangan sumber daya manusia dan Tridharma Perguruan Tinggi	Penyediaan sarana pembelajaran praktik bagi mahasiswa serta penguatan Tridharma Perguruan Tinggi.	1. Magang dan/atau praktik kerja mahasiswa melalui program Kampus Berdampak pada Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik; 2. Penyediaan narasumber, tenaga ahli, dan/atau praktisi mengajar serta publikasi bersama oleh PARA PIHAK.	1. Terlaksananya program magang Kampus Berdampak setiap tahun; 2. Terpenuhinya kebutuhan narasumber dan tenaga ahli serta publikasi bersama.	✓	✓	✓	✓	1. Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik, Kemenko Infra; 2. Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi, Kemenko Infra; 3. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret.

PARAF PIHAK PERTAMA	
PARAF PIHAK KEDUA	